

DAFTAR PUSTAKA

- Bassey. (1999). *Case Study Research In Educational Settings*. Buckingham: Open University Press.
- BPS. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia. *Badan Pusat Statistik*, 36, 1. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>
- Bridgman, J & Davis, G. (2000). *Australian Policy Handbook*.
- Data IKK dan SPM*. (n.d.). bapedda.jogjaprovo.go.id
- Hamzah, A. (2019). (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*. Batu: Literasi Nusantara.
- J., M. L. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Kemenaker. (2021). *Panduan pengawasan ketenagakerjaan di masa pandemi*.
- Keppeler, F., & Papenfuß, U. (2021). Employer Branding and Recruitment: Social Media Field Experiments Targeting Future Public Employees. *Public Administration Review*, 81(4), 763–775. <https://doi.org/10.1111/puar.13324>
- Khasna, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4 (1), 28–36.

Mahy, P. (2020). COVID-19 and Labour Law: Indonesi. *Italian Labour Law E-Journal*, Vol. 13 (. <https://doi.org/https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10937>

“Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan.”

(n.d.). *CNN Indonesia*.

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230627185357-97-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230627185357-97-967322/norma-100-inovasi-kemnaker-untuk-tingkatkan-kepatuhan-ketenagakerjaan)

[967322/norma-100-inovasi-kemnaker-untuk-tingkatkan-kepatuhan-ketenagakerjaan.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230627185357-97-967322/norma-100-inovasi-kemnaker-untuk-tingkatkan-kepatuhan-ketenagakerjaan)

Phillips, N., Lebaron, G., & Wallin, S. (2018). Mapping and Measuring the Effectiveness of Labour-related Disclosure Requirements for Global Supply Chains. *ILO Paper, March*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_632120.pdf

Pusdatin. (n.d.). *Satu Data Ketenagakerjaan*.

Statistik, B. P. (n.d.). *Perusahaan Industri Pengolahan*. Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu

Strategis, R. (2023). *Nama organisasi perangkat daerah*.

Subarsono, AG, M.Si, M. . (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Sugiyono, S. (2018). (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: CV.

Alfabeta.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja diakses tanggal 7

September 2021. (n.d.). <http://www.bkpm.go.id/> UU Cipta Kerja : Dorong

Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja diakses tanggal 7 September 2021

wajiblapor. (n.d.). www.wajiblapor.kemnaker.go.id

Weil, D. (2008). A strategic approach to labour inspection. *International Labour*

Review, 147(4), 349–375. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2008.00040.x>

William N. Dunn. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.*

Gadjah Mada University Press.

Wolfgang Von Richthofen. (2007). *Pengawasan Ketenagakerjaan.* International

Labour Organizations.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ys4PRFT-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ys4PRFT-22IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=info:1H6h0Nswj3gJ:scholar.google.com/&ots=5noEQVAZdR&sig=_21Wa1b2_yxyjVyn6MWmFkZhFRY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

[22IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=info:1H6h0Nswj3gJ:scholar.google.com/&ots=](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ys4PRFT-22IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=info:1H6h0Nswj3gJ:scholar.google.com/&ots=5noEQVAZdR&sig=_21Wa1b2_yxyjVyn6MWmFkZhFRY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

[5noEQVAZdR&sig=_21Wa1b2_yxyjVyn6MWmFkZhFRY&redir_esc=y#](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ys4PRFT-22IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=info:1H6h0Nswj3gJ:scholar.google.com/&ots=5noEQVAZdR&sig=_21Wa1b2_yxyjVyn6MWmFkZhFRY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

[v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ys4PRFT-22IC&oi=fnd&pg=PR15&dq=info:1H6h0Nswj3gJ:scholar.google.com/&ots=5noEQVAZdR&sig=_21Wa1b2_yxyjVyn6MWmFkZhFRY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode.* PT. Rajagrafindo Persada.

Yuwono, A. B. & T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep & Strategi.*

Peraturan Perundangan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari

- Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 312 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit;
13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
14. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja No. 5 /228/AS.03.00/ IV/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pandemi COVID-19;

15. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.8/M/HK.05/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena COVID-19;
16. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/7/AS.02.02/V2020 Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan; dan
17. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: 334/ AS.02.02/IX/2020 tentang Antisipasi Meningkatnya Kasus Konfirmasi COVID-19 di Tempat Kerja.